RANCANG BANGUN EKONOMI SYARI'AH

Rudi Ahmad Suryadi
STAI Al-Azhary, Cianjur

ABSTRACT

Islamic economics is developed on the assumption that economic issues are complex or multi-dimensional, requiring interdisciplinary approaches, especially between traditional religious disciplines and general multi-disciplinary science. Thus, the science of Islamic Economics is an institutional economics science. The approach raises a certain structure of thought and various schools of thought. The result of complex and multi-dimensional thinking raises three needs. First, the needs of stream-lining of the findings are judged to be the most close to the truth. Second, there is the need of consistent and coherent structures and the third, it requires integration to form strength and nagging in its application. On the basis of assumptions in a nash then, Islamic economic thinking can basically be classified into three. The first, it is the economic thought embodied in the theory and methodology of thought or epistemology. Second, it is the economic system as a medium of application through legislation and institutionalization in resource management. Third, it the realities of the economy that run, both in the forms of the economy of Muslims, the Indonesian nation and the interconnected world.

Keywords: *Design, shari, economy*

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam dikembangkan berdasarkan asumsi, bahwa persoalan ekonomi itu bersifat kompleks atau multi-diomensional, sehingga mem butuhkan pendekatan antar disiplin, khu susnya antara displin ilmu-ilmu ke-agamaan tradisional dan ilmu pengeta huan umum multi-disiplin. Dengan demikian, maka ilmu Ekonomi Islam itu adalah sebuah ilmu ekonomi kelembagaan *(institutional economics).* Pendekatan tersebut menimbulkan suatu struktur pemikiran tertentu dan aneka aliran pemikiran. Hasil pemikiran yang kompleks dan multi-dimensional itu menimbulkan tiga kebutuhan. Pertama, kebutuhan *stream-lining* atau pengaris bawahan berbagai penemuan yang dinilai paling mendekati kebenaran. Kedua, kebutuhan restrukturisasi yang konsisten dan koheren. Dan ketiga membutuhkan integrasi untuk membentuk kekuatan dan keuanggulan dalam aplikasinya.

Atas dasar asumsi di anas maka, pemikiran Ekonomi Islam pada dasar nya dapat digolongkan menjadi tiga. Pertama adalah pemikiran ekonomi yang berujud teori dan metodologi pemikiran atau epistemologi. Kedua adalah sistem ekonomi sebagai media penerapannya melalui legislasi dan pelem bagaan dalam pengelolaan sumberdaya. Ketiga, realitas perekonomian yang ber jalan, baik berupa perekonomian umat Islam,

bangsa Indonesia maupun dunia yang saling terkait.

Dewasa ini pemikiran Ekonomi Islam telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan cakupan yang komprehensif. Pada tingkat perkembang an ini sudah bisa diperoleh bahan untuk menyusun konsep sistem ekonomi Islam, baik mikro maupun makro. Sistem ekonomi itu mengandung dua pengertian. Pertama sistem ekonomi yang universal, misalnya kapitalisme, sosialisme atau sosial demokrasi. Kedua sistem ekonomi yang diberlakukan pada tingkat nasional. Kategori pertama perlu lebih dahulu disusun dengan pertama-tama menyusun arsitektur atau rancang bangun. Disini sistem ekonomi diasumsikan atau diumpamakan sebagai suatu bangunan, rumah atau gedung. Sebelum dibangun menjadi sistem, diperlukan pedoman berupa desain, arsitektur atau rancang bangun.

PEMBAHASAN

Konsep Rancang Bangun Ekonomi Mikro Syariah

Islam adalah agama yang sangat komplek dimana apa yang kita temui di sekitar kita dapat ditemukan dalam Islam. Seperti halnya sistem ekonomi, Islam juga mempunyai pengaruh penting dalam membangun kesejah teraan umatnya dengan cara yang santun. Cara Islam memandang tentu berbeda dengan pandangan ekonomi Kapitalis dan Sosialis seperti halnya dalam ekonomi Islam menjaga keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan, menyangkut ekonomi yang bermoral dan lain sebagainya.

Dalam pembangunannya tentu dibutuhkan suatu lembaga untuk ikut mendukung terlaksananya penerapan ekonomi Islam salah satunya adalah lembaga pemerintahan. Hal itu karena pemerintahan memliki kekuasaan yang besar dimana telah dicontohkan dari sistem kekhalifahan. Begitu pula dengan masyarakat yang ikut mendukung sarana yang diberikan pemerintah dengan baik sehingga dapat cepat terwujud secara optimal.

Karakteristik dan rancang bangun sistem ekonomi Islam perlu dikaji secara terus menerus sehingga kesejahteraan yang bersih dapat terwujud. Al-Quran dan Hadits juga ikut membantu menentukan bagaimana yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan ekonomi yang baik.

Dalam pembahasan tentang apa yang dimaksud dengan ekonomi Islam, harus mengetahui terlebih dahulu mengenai rancang bangun ekonomi Islam[1]. Dengan mengetahui rancang bangun ekonomi Islam kita dapat memperoleh gambaran utuh dan menyeluruh secara singkat tentang ekonomi Islam yang tediri atas atap, tiang, dan landasan.

Pengertian Sistem Ekonomi Islam

Definisi sistem ekonomi Islam menurut Taqiyyuddin an-Nabhani

[1]Adiwarman A. Karim, 2012. *Ekonomi Mikro Islam,* (edisi ke-4). Jakarta: Rajawali Press, hlm. 17.

adalah kegiatan mengatur urusan harta keka yaan, baik yang menyangkut kepemi likan, pengembangan maupun distri busi. Dengan kata lain, definisi ini memandang aktivitas ekonomi sebagai sesuatu yang harus oleh syariah baik dalam segi kepemilikan, cara kepemilikan, metode pengembangan kekayaan dan cara menjaga keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.[2]

Mengapa harus Ekonomi Islam?

Revolusi ilmu pengetahuan yang terjadi di Eropa Barat sejak abat ke 16 Masehi telah menyebabkan pamor agama dan kekuasaan institusi gereja (agama kristen) menjadi menurun drastis. Hal ini disebabkan dogma yang dipegang dan diajarkan banyak yang bertentangan dengan fakta-fakta yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan.

Akibatnya terjadi sekulerisasi di Eropa Barat dalam segala bidang, termasuk dalam ilmu pengetahuan. Agama, Tuhan, Nilai-nilai dan Norma-norma secara drastis dikeluarkan dari struktur pemikiran para ilmuwan, maka lahirlah ilmu pengetahuan yang bersifat positivistik. Ilmu Positivistik menerangkan hubungan antar *variabel to predict* meramal kan kejadian dimasa depan berdasarkan teori yang ada. Pertanyaan normatif "*what should*?, *what best*? Hal ini dikesam pingkan dan diserahkan sepenuhnya kepada individu-individu. Pemahaman seperti yang dikatakan sebagai semangat renaissance-humanisme (kebangkitan manusia) dan gerakan aufklarung (pencerahan) di Eropa Barat.

Ada beberapa hal yang mendorong perlunya mempelajari karakteristik ekonomi Islam, yaitu:[3] (1) meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi Kapitalis (memberikan penghargaan terhadap prinsip hak milik) dan Sosialis (memberikan penghargaan terhadap persamaan dan keadilan) tidak bertentangan dengan metode ekonomi Islam; (2) membantu para ekonomi muslim yang telah berkecimpungan dalam teori ekonomi konvensional dalam memahami ekonomi Islam; (3) Membantu para peminat studi fiqh muamalah dalam melakukan studi perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional.

Sumber karakteristik Ekonomi Islam adalah Islam yang meliputi tiga asas. Ketiga asas secara asasi dan bersama mengatur teori ekonomi Islam, yaitu asas akidah, asas akhlak dan asas muamalah (hukum).

---

[2] M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, 2001. *Pengantar Ekonomi Islam,* Bogor: Al Azhar Press, hlm. 17.

[3] Ali Yafie, 2003. *Fiqih Perdagangan Bebas*, Cetakan Kedua, Jakarta: Teraju dan PT. Ahad-Net Internasional, hlm. 27.

Karakteristik Sistem Ekonomi Islam

Ada, beberapa karakteristik ekonomi Islam, yaitu:[4] (1) harta kepunyaan allah dan manusia merupakan khalifah atas harta. Dalam Islam kepemilikan pribadi sangat dihormati walaupun hakikatnya tidak mutlak dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan orang lain dan tentu saja tidak bertentangan dengan ajaran Islam. (2) ekonomi terikat dengan akidah, syariah (hukum) dan moral. Hubungan ekonomi Islam dengan akidah dan syariah tersebut memungkinkan aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi ibadah; (3) keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Sesungguhnya Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dengan akhirat. Setiap aktivitas manusia di dunia akan berdampak pada kehidupan di akhirat. Sehingga, aktivitas keduniaan tidak boleh mengorbankan kehidupan akhirat. (4) ekonomi Islam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Keseim bangan dalam sistem sosial Islam adalah Islam tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu termasuk dalam bidang hak milik. (5) kebebasan Individu dijamin dalam Islam. Individu-individu dalam perekonomian Islam diberikan kebebasan untuk beraktivitas baik secara perorangan maupun kolektif untuk mencapai tujuan. (6) Negara diberi wewenang turut campur dalam Perekonomian. Islam memperkenankan negara untuk mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun sosial dapat terpenuhi secara proporsional. (7) Bimbingan donsumsi. Dalam hal bimbingan konsumsi Allah berfirman dalam (QS. Al-A'raaf [7]: 31), yang artinya:

> "...Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan".[5]

Ada pula larangan untuk bermewah-mewahan dan bersikap angkuh terhadap hukum karena kekayaan, seperti firman Allah dalam (QS. Al-Israa[17]: 16), yang artinya:

> "...Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri. Maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya menaati Allah) tetapi mereka melaku kan kedurhanakan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku ter hadapnya perkataan (ketentuan kami). Kemudian kami

[4]Edwin. dkk., 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam,*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group., hlmm 77.

[5]Ashiddiqi, dkk, 1971. *Al-Qur.an...,* hlm. 225.

hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya".[6]

Petunjuk Investasi

Tentang kriteria atau standar dalam menilai proyek investasi, al-mawsu'ah Al-ilmiyah wa al-amaliyah al-Islamiyah memandang ada lima kriteria yang sesuai dengan Islam untuk dijadikan pedoman dalam menilai proyek investasi, yaitu: (1) Proyek yang baik menurut Islam; (2) Memberikan rezeki seluas mungkin kepada anggota masyarakat; (3) Memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan, dan keka yaan; (4) Memelihara dan menumbuh kembangkan harta; (5) Melindungi kepentingan anggota masyarakat.

Zakat

Zakat adalah salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak terdapat dalam perekono mian lain. Sistem perekonomian di luar Islam tidak mengenal tuntutan Allah kepada pemilik harta, agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki dan dendam.

Larangan Riba

Islam menekankan pentingnya memfungsikan uang pada bidangn yang normal yaitu sebagai fasilitas transaksi dan alat penilaian barang. Diantara faktor yang menyelewengkan uang dari bidangnya yang normal adalah bunga (riba).

[6]*Ibid.*, hlm. 426.

Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Secara umum prinsip-prinsip ekonomi menjadi tiga kelompok besar. Masing-masing kelompok besar ini membentuk suatu bangunan yang akan menjadi prinsip ekonomi islam.

Pertama (nilai universal)

Nilai universal, yang menjadi teori dari ekonomi islam dan menjadi landasan ekonomi islam yaitu: (1) *Tauhid* (keesaan Tuhan), merupakan pondasi ajaran Islam. Segala sesuatu yang kita perbuat di dunia nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Sehingga termasuk didalamnya aktivitas ekonomi dan bisnis nantinya akan dipertanggungjawabkan juga; (2) '*Adl* (keadilan). Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Adil yang dimaksud disini adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi, sehingga penerapannya dalam kegiatan ekonomi adalah manusia tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain atau merusak alam untuk memperoleh keuntungan pribadi; (2) *Nubuwwah* (kenabian). Setiap muslim diharuskan untuk meneladani sifat dari nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang patut diteladani untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam bidang ekonomi yaitu : Siddiq (benar, jujur), Amanah (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas), Fathanah (Kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualita) dan tabligh (komunikasi, keterbukaan, pemasaran); (3) *khilafah* (pemerintahan). Dalam Islam,

peranan yang dimainkan pemerintah terbilang kecil akan tetapi sangat vital dalam perekonomian. Peranan utama nya adalah memastikan bahwa perekonomian suatu negara berjalan dengan baik tanpa distorsi dan telah sesuai dengan syariah; (4) *Ma'ad* (hasil). Imam Ghazali menyatakan bahwa motif para pelaku ekonomi adalah untuk mendapatkan keuntungan/profit/laba. Dalam islam, ada laba/keuntungan di dunia dan ada laba/keuntungan di akhirat.

Kedua (prinsip-prinsip derivatif),

Prinsip-prinsip derivatif, merupakan prinsip-prinsip sistem ekonomi islam yang juga menjadi tiang ekonomi islam yaitu: (1) *Multitype Ownership* (kepemilikan multijenis) merupakan turunan dari nilai tauhid dan adil. Dalam ekonomi Islam, kepemilikan swasta atau pribadi tetap diakui. Akan tetapi untuk menjamin adanya keadilan, maka cabang-cabang produksi yang strategis dapat dikuasai oleh negara; (2) *Freedom to act* (Kebebasan bertindak atau berusaha) merupakan turunan dari nilai nubuwwah, adil dan khilafah. Freedom to act akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian karena setiap individu bebas untuk bemuamalah. Pemerintah akan bertindak sebagai wasit yang adil dan mengawasi pelaku-pelaku ekonomi serta memastikan bahwa tidak terjadi distorsi dalam pasar dan menjamin tidak dilanggarnya syariah; (3) *Social Justice* (Keadilan Sosial) merupa kan turunan dari nilai khilafah dan ma'ad. Dalam ekonomi islam, pemerintah bertanggungjawab menjamin peme nuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara kaya dan miskin.

Ketiga Akhlak

Teori ekonomi islam dan sistemnya belumlah cukup tanpa adanya manusia yang menerapkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Dengan kata lain, adanya manusia yang berakhlak adalah hal mutlak dalam ekonomi. Kinerja suatu bisnis atau ekonomi tidaklah bergantung kepada teori dan sistemnya saja, melainkan pada man behind the gun-nya. Oleh karena itu akhlak menjadi bagian ketiga dan merupakan atap yang menaungi ekonomi islam.

Akhlak Merupakan Perilaku Islami dalam Perekonomian; menjadi landasan teori yang kuat, serta prinsip-prinsip sistem ekonomi islam yang mantap. Namun, dua hal ini belum cukup karena teori dan sistem menuntut adanya manusia yang menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam teori dan sistem tersebut. Dengan kata lain, harus ada manusia yang berperilaku, berakhlak secara professional (*ihsan, itqan*) dalam bidang tertentu yakni ekonomi. Baik dia berada pada posisi produsen, konsumen, pengusaha, karyawan atau sebagai pejabat pemerintah sekaligus. Karena teori yang unggul dan sistem ekonomi yang sesuai syariah sama sekali bukan

merupakan jaminan bahwa perekonomi an umat islam akan otomatis maju.

Sistem ekonomi islam hanya memastikan bahwa tidak ada transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariah. Tetapi chimera bisnis tergan tung pada *man behind the gun*-nya. Karena itu pelaku ekonomi dalam kerangka ini dapat saja dipegang oleh umat non-muslim.

Perekonomian umat islam baru dapat maju bila pola piker dan pola laku muslimin dan muslimat sudah *itqan* (tekun) dan *ihsan* (professional). Hal ini mungkin salah satu rahasia sabda Nabi: "*Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlaq*". Karena akhlak (perilaku) menjadi indikator atau tolak ukur baik-buruknya manusia. Baik-buruknya perilaku bisnis para pengusaha menentukan sukses-gagalnya bisnis yang telah dijalankannya.

Sistem ekonomi adalah satu kesatuan mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan yang mengimplemen tasikan keputusan terhadap produksi, distribusi dan konsumsi dalam suatu daerah atau wilayah. Terdapat banyak faktor yang membentuk suatu sistem ekonomi, seperti ideologi, nilai-nilai yang dianut, kebudayaan, sistem politik, keadaan alam, sejarah dan lain-lain. Pada umumnya, sistem ekonomi juga didasarkan pada pemikiran, konsep, atau teori-teori ekonomi tertentu yang diyakini kebenarannya.

Rancang Bangun Sistem Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memiliki beberapa elemen kunci dalam rancangan bangun sistem ekonomi Islam ada lima, diantaranya:[7]

Kepemilikan dalam Islam

Maksud nya kepemilikan mutlak dari keselu ruhannya adalah Allah SWT, sedangkan yang mengemban amanah adalah manusia. Dari kepemilikan manusia sendiri dibagi menjadi beberapa, yaitu: (1) hak milik individual (*Milkiyah fardhiah/private ownership*); (2) hak milik umum (*Milkiyah' amah/public ownership*); (2) hak milik negara (*Milkiyah daulah/ state ownership*)

Mashlahah sebagai intensifnya ekonomi

Di dalam Islam diakui ada dua macam intensif yaitu material dan nonmaterial, kedua hal ini pelaksanaanya tergantung dari manusianya sendiri memenuhi kegiatan sosial atau kegiatan kunci guna melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Tetapi secara garis besar, intensif dikategorikan menjadi dua jenisnya, yaitu intensif yang akan diterima di dunia dan di akhirat.

Konsep dan pemahaman mengenai kepemilikian harta membawa implikasi kepada motivasi dan insentif setiap individu, ketika seseorang meyakini bahwa harta yang dalam kekuasaanya adalah hak milikknya secara mutlak,

[7]Abdul Sami' Al-Mishri, 2006, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 145-147.

maka iapun akan merasa memiliki kebebasan untuk memanfaatkanya sesuai dengan kehendakanya tanpa perlu memperdulikan nilia-nilai yang idak bersesuaian dengan kepentinganya.

Sebaliknya, seorang budak, pada masa-masa sebelum Islam misalnya, tidak pernah merasa memiliki harta meskipun ragany sendiri sehingga segala tindakanya lebih didorong untuk memenuhi kehendsk pihak lain.dalam paham kapitalisme, kegiatan ekonomi cenderung dimotivasi oleh kepentingan individu.

Misalnya, seorang konsumen cenderung termotivasi untuk memaksimal kan kepuasan individunya dan seorang produsen cenderung termotivasi untuk mencari keuntungan pribadi sebanyak-banyaknya. sebaliknya dalam paham sosialisme, kegiatan ekonomi lebih dido romg oleh insentif keamanan/ kenya manan sosial. Meskipun kedua paham ini mendasarkan pada insetip yang berbeda, namun baik insentif individu atau insentip sosial sering kali di ukur dari aspek materil semata.

Kesejahteraan individu sering kali dimaknai sebagai tingginya pendapatan dan daya beli individu, dan kesejahteraan sosial sering kali dimaknai sebagai tingginya pendapatan dan daya beli masyarakatIslam mengakui adanya insentip material ataupun nonmaterial dalam kegiatan hal ini dikerenakan ajaran Islam memberikan peluang setiap individu untuk memenuhi kepentingan individunya, kepentingan sosial ataupun kepentingan sucinya untuk beribadah kepada Allah.

Secara garis besar, insentif kegiatan ekonomi ajaran Islam bisa dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu insentif yang akan diterima di dunia dan insentif yang akan diterima di akherat, insentif di dunia mungkin akn diterima oleh individu masyarakat, baik dalam kegiatan konsumsi, produsi ataupun distribusi. Insentif di akhert adalah berupa imbalan (ganjaran atu hukuman) yang hanya akan dirasakan di akherat, seperti yang dijanjikan oleh Allah.

Musyawarah sebagai prinsip pengembangan keputusan

Pengambilan dalam ekonomi Islam berdasarkan pada mekanisme pasar, namun guna bertujuan memberi peluang suara kebersamaan dan menjunjung nilai kebaikan maka mengunakan sistem musyawarah serta perjanjian antara beberapa pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan kesepakatan dan kemaslahatan bersama. Musyawarah sendiri merupakan kombinasi antara proses sentralisai dan desentralisasi yang dikendalikan oleh nilai-nilai mashlahah.

Secara umum, pengambilan keputusan bisa dibedakan antara dua kutub santralisasi dan dasentralisasi. Sistem sentralisasi menekankan bahwa pengam bilan keputusan dilakukan oleh satu otoritas, pemerintah pusat

misalnya, dan pelaku ekonomi hanya berperan sebagai pelaksana pengambil keputusan. Dalam konteks perekonomian suatu negara, sitem ini akan menghasilkan suatu perekonomian terencana (planned economy). Sistem ini dilahirkan oleh paham sosialisme, pada sisi lain kapitalisme, pengambilan keputusan cenderung diserahkan kepada setiap pelaku ekonomi sehingga tidak diperlukan tidak diperlukan suatu otoritas tunggal dalam pengambilan keputusan ekonomi, sitem desentralisasi ini akan menghasilkan suatu pasar persaingan bebas seperti yang diharapkan oleh kapitalisme.

Ekonomi Islam memandang bahwa individu, masyarakat, serata pemerintah memiliki peran sendirisendiri sehingga sistem pengambilan sentralistik atau desentralistik semata tidaklah akan mampu untuk memenuhi kebutuhan individu dan social. Pada level dan aspek tertentu diperlukan pengambilan keputusan yang desentralistik karena dalm ini prinsip saling ridho sangatlah dominan, misalnya dalm hal penetapan harga input atau pun output.

Dalam aspek lainnya, misalnya ketika prinsip kebenaran dan keadilan sangat dominan, maka prinsip sentralistik berbasis Al-Qur'an perlu diterapkan, misalnya dalm hal distribusi barang publik dan kesejahteraan dan penegakan kebenaran.

Secara umum, pengambilan keputusan dalam ekonomi Islam didasarkan atas prinsip mekanisme pasar, namun dengan tetap memandang nilai-nilai kebaikan bersama dan nilai-nilai kebenaran.

Oleh karena itu, musyawarah (shuratic process) untuk mendapatkan kesepakatan atas dasar kemaslahatan merupakan prinsip pengambilan keputusan yang sesuai ajaran Islam. Musyawarah merupakan kombinasi antara *prosesdesentralisasi dan sentralisasi* yang dikandalikan nilai-nilai mashlahah

Pasar yang adil sebagai modal koordinasi

Maksudnya dalam Islam intensif individualistis diakomodasi sebatas tidak bertentangan dengan kepentingan suci (ibadah). Sehingga mekanisme pasar tidak dapat memenuhi intensif tersebut. Kebutuhan individu yang harmoni dengan moralitas Islam akan terwujud dalam suatu meknisme pasar yang mengedepankan moralitas dan kerjasama.

Kebebasan individu yang harmoni dengan kebutuhan sosial dan moralitas Islam akan terwujud dalam suatu mekanisme pasar yang mengedepankan aspek moralitas dan kesama. Ibn Taimiyah menyebutkan mekanisme ini dengan istilah 'pasar yang adil' atau gabungan antara persaingan dan kerja sama (*coopetition*). Mekanisme pasar diberikan ruang gerak untuk penentuan harga, namun masyarakat dan syariah Islam tetep berperan mengontrol jalannya pasar sehingga masyarakat yang adil dan harmoni bisa terwujud.

Dengan demikian, mekanisme pasar murni bukanlah menjadi kendali perilaku pada pelaku ekonomi, namun pasar juga dikendalikan oleh pemerintah dan masyarakat (*citizenship*) dalam upaya mencapai keadilan dan mashlahah maksimum.

Jika dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya, ekonomi Islam tidak berbeda dalam hal hasil yang tampak, atau mekanisme pasarnya, namun perbedaan ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan konsep kepemilikan, intensif dan mekanisme pengambilan keputusan.

Pelaku Ekonomi dalam Islam

Pelaku ekonomi, terdiri atas: [8] *pertama;* pelaku pasar pada dasarnya terdiri atas rumah tangga-rumah tangga dan perusa haan-perusahaan, sementara pasar dapat diklasifikasikan menjadi pasar input dan pasar output. Rumah tangga dapat terdiri atas perseorangan atau kelompok (misalnya keluarga), sedangkan perusa haan dapat berupa perseorangan atau lembaga usaha. Di pasar input, rumah tangga bertindak sebagai penyedia faktor produksi yang dibutuhkan oleh perusahaan, sedangkan di pasar output rumah tangga adalah konsumen bagi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan.

Di pasar input, rumah tangga menyediakan berbagai faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Faktor-faktor produksi ini akan digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Rumah tangga akan memperoleh imbalan berupa pendapatan sewa, upah, bagi hasil, dan laba yang kemudian akan dipergunakannya untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan.

Ajaran Islam menghargai pasar sebagai wahana bertransaksi atau perniagaan yang *halal* (sah/legal) dan *thayyib* (baik) sehingga secara umum merupakan mekanisme alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi yang paling ideal. Penghargaan Islam tehadap mekanisme pasar berangkat dari ketentuan Allah bahwa perniagaan harus dilakukan dengan cara yang baik berdasarkan prinsip saling ridha (*'an taradin minkum*) sehingga tercipta keadilan

Harga pasar diatur oleh tangan Tuhan (*Good Hand*), sebagaimana sunnah Nabi,

> "....Allah itu sesunggughnya adalah penentu harga ,penahan, pencurah, serta pemberi rezeki. Aku mengharap kan dapat menemui Tuhanku di mana salah seorang dari kalian tidak menun tutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta" (HR. Tirmidzi) [9].

Pasar merupakan mekanisme perniagaan yang memenuhi kriteria tersebut. Di pasar, seseorang bebas melaku kan transaksi sesuai dengan

[8] Koeter, G.H., Hiemstra, P.S. 1998. "Secretory Leukoprotease Inhibitor: A Native Antimicrobial Protein Presenting a New Therapeutic Option?" *Journal Thorax;* 53: hlm.9

[9] Abdul Sami, 2006, *Pilar-Pilar.....,* hlm. 171.

kebutuhan dan keinginannya. Mekanisme pasar merupakan suatu kekuatan yang bersifat missal (*impersonal*) dan alamiah (*natural*) sehingga mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat lebih luas.

Dalam situasi yang bersaing sempurna (*perfect competition market*), tak ada seorang pelaku pun secara indivi dual dapat mengendalikan mekanisme pasar. Allahlah yang mengatur naik turunnya harga.

Penghargaan yang tinggi ini telah dibuktikan dalam sejarah yang panjang kehidupan ekonomi masyarakat Muslim awal, dimana pasar memegang peranan yang penting. Perekonomian masyarakat Muslim pada masa Rasulullah Saw. adalah perekonomian yang menjunjung tinggi mekanisme pasar. Bahkan, hingga periode awal masa kerasulannya Nabi Muhammad Saw. sendiri adalah salah seorang pelaku pasar yang aktif. Beliau mengawasi jalannya mekanisme pasar di Madinah dan sekitarbya agar tetap dapat berlangsung secara Islami.

Dalam pasar yang Islami, para pelaku pasar didorong oleh semangat persaingan untuk meraih kebaikan (*fastabiqul khairat*) sekaligus kerja sama dan tolong-menolong (*ta'awun*) dalam bingkai nilai dan moralitas Islam. Pasar yang Islami adalah sebuah *free cooperation market*. Para pelaku pasar tidak hanya mengejar keuntungan material, tetapi juga barakah Allah. Pasar akan menjadi arena perniagaan komoditas yang *halalan toyyiban* saja sehingga yang haram harus ditinggalkan. Aktivitas pasar juga harus mencermikan persaing an yang sehat (*fair play*), kejujur an (*honesty*), keterbukaan (*tranparancy*) dan keadilan (*justice*) sehingga harga yang tercipta adalah harga yang adil (*just price*). Dengan kata lain, pasar ini tidak mengandung deviasi dari nilai dan moralitas Islam.

Meskipun pasar merupakan mekanisme alokasi dan distribusi sumber daya yang paling efisien, tetapi ia memiliki kelemahan dan kekurangan. Pasar tidak dapat menyelesaikan dengan baik beberapa permasalahan ekonomi yang penting, misalnya penyediaan barang dan fasilitas publik, penyelesaian masalah eksternalitas, penegakan keadilan social dan distribusi pendapatan, dan lain-lain. Pada dasarnya pasar bekekrja dengan mekanisme harga sehingga norma dan etika sering kali juga tidak diakomodasi oleh pasar. Pasar sering kali juga bukan mekanisme yang tepat untuk mengalokasikan barang dan jasa sesuai dengan prioritas kebutuhan yang seharusnya. Hal-hal inilah yang disebut dengan kegagalan pasar (*market failure*).

Ketidaksempurnaan pasar (*market imperfection*) ini juga mengakibatkan alokasi sumber daya pada akhirnya tidak seefisian yang diharapkan. Oleh karena itu, kelemahan dan kekurangan pasar ini harus diperbaiki dengan peran aktif dari pemerintah dan masyarakat;

Kedua. pemerintah memiliki kedudukan dan peranan penting dalam ekonomi Islam. Ekisistensi peran pemerintah pemerintah dalam sistem ekonomi Islam bukan semata karena kegagalan pasar dan ketidaksempurnaan pasar. Pada dasar nya, peranan pemerintah merupakan derivasi dari konsep kekhalifahan dan konsukuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif (*fard al-kifayah*) untuk merealisaikan *falah*. Pemerintah adalah pemegang amanah Allah dan Rasul-Nya serta amanah masyarakat untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan (*al-adl wah ihsan*) bagi seluruh umat.

Secara umum peranan pemerintah ini akan berkait dengan upaya mewujudkan konsep pasar yang Islami dan mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan. Suatu pasar yang Islami akan sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari pemerintah.

Pemerintah juga memiliki peran penting dalam menyelesaikan barang dan fasilitas publik, mengatasi masalah eksternalitas, dan berbagai masalah ekonomi lain yang memang tidak bisa terselesaikan melalui mekanisme pasar. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, pemerintah dapat bertindak sebagai perencana, pengawas, pengatur, pro dusen sekaligus konsumen bagi aktivitas pasar.

Adapun beberapa tugas pokok pemerin tah antara lain, yaitu: (1) Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar bagi masyarakat; (2) Pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan; (3) Menyu sun peren canaan pembangunan ekonomi; (4) Mengambil berbagai kebijakan ekonomi dan non ekonomi yang relevan bagi perwujudan *falah* masya rakatnya.

Negara memiliki perangkat dan sumberdaya termasuk keuangan untuk memberikan jaminan ini. Desain pembangunan ekonomi secara keseluruhan tidak bisa di serahkan begitu saja kepada mekanisme pasar, sebab pasar memiliki kegagalan dan ketidak sempurnaan. Dan Negara bertugas untuk membuat perencanaan sekaligus mengawasi jalannya pembangunan ekonomi.

Ketiga; Peran Masyarakat dalam Ekonomi Islam, berkewajiban mereali sasikan falah pada dasarnya merupakan tugas seluruh *economic agents*, termasuk masyarakat. Terdapat banyak aktivitas ekonomi yang tidak dapata diselenggarakan dengan baik oleh mekanisme pasar maupun oleh peran pemerintah sehingga masyarakat harus berperan langsung. Terdapat *fenomena market* failure dan *government failure.*

Pasar pada hakikatnya adalah wahana untuk mengekspresikan kebebasan individu dalam berniaga, yang tentu saja lebih didorong oleh motif-motif mencari keuntungan individual. Pemerintahan dan masyarakat pada dasarnya adalah dua institusi yang memiliki fungsi untuk

merealisasikan segala kewajiban kolektif untuk mewujudkan falah.

Peranan masyarakat juga muncul karena adanya konsephak milik public dalam ekonomi islam,seperti waqf. Kekayaan Waqf adalah kekayaan masyarakat secara keseluruhan dan berlaku sepan jang masa karenanya waqf merupakan hak milik masyarakat yang tidak tergan tung kepada pemerintah yang berkuasa.

Pemerintah dapat berganti dari waktu ke waktu,sementara masyarakat trikat dalam kewajiban sosial jangka panjang. Karenanya, berbagai kekayaan waqf akan tetap di kelola oleh masyarakat sendiri.Dalam pandangan islam, masyarkat bisa di artikan secara sempit ataupun luas dan hierarki ini terkait tanggungjawab dan hak masing-masing. Dalam lingkup yang paling kecil setelah individu adalah masyarakat keluarga.

Ketiga; Kapitalisme dan Sosialisme; Aliran utama ekonomi (main stream economics) pada awalnya terkotak menjadi dua kutub, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Kedua paham ini sering kali dikonotasikan sebagai representasi perilaku ekonomi Negara tertentu, misalnya kapitalisme dicerminkan oleh Amerika dan sosialisme dicerminkan oleh Uni Soviet.

Oleh karena itu, sejalan dengan perkembangan ekonomi dan politik antarnegara, maka kritik terhadap kedua paham ini bermunculan sehingga lahiarlah kapitalisme campuran atau sosialisme campuran.

Paham kapitalisme diilhami oleh perlunya kebebasan setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya agar kesejahteraan masyarakat tercapai. Pemahaman ini didasari oleh filosofi Adam Smith bahwa terselenggaranya keseimbangan pasar dikarenakan manusia mementingkan diri sendiri. Diasumsi kan bahwa setiap manusia adalah indi vidualistik nasional sehingga kebe basan pasar akan menghasilkan kesejah teraan masyarakat yang maksimum.

Mekanisme psar yang dimetaforsisikan dengan tangan gaib (invisible hand) akan mengatur bagaimana jalan nya keseimbangan antara penawaran dan permintaan pasar. Smith me nulis "kita bisa makan bukan hanya kebaikan si tukang roti, tukang minu man atau situkan daging, melainkan karena sifat memenitngkan diri sendiri yang ada dalam diri mereka.

Kita bukan mengharap cinta mereka terhadap orang lain, melainkan cinta mereka terhadap dirinya sendiri" kebebasan ekonomi merupakan ide dasar kapitalisme yang mengilhami setiap perilaku ekonomi setiap individu, pasar dan kebijakan pemerintah. Dalam perjalannya sistem kapitalisme ini cenderung mengarah kepada liberalis me. Kebutuhan manusia cenderung diukur dari aspek materi atau harta, dan mekanisme penentuan harga secara ideal oleh pasar.

Disisi lain, ekonomi sosialisme mempunyai tujuan kemakmuran bersama. Filosofinya adalah bagaimana setiap individu bersama-sama memperoleh kesejahteraan. Perkembangan sosialis me dimulai dari kritik ter hadap kapitalisme kapitalisme yang pada waktu itu kaum kapitalis atau dise but kaum borjuis mendapat legitimasi gereja untuk mengeksploitasi buruh. Inilah yang menjadikan Karl Marx mengkritik sistem kapitalis sebagai ekonomi yang tidak sesuai dengan aspek kemasya rakatan.

Pemikiran awal sosialisme meletak kan unsur kemanusiaan pada posisi paling tinggi dari alat produksi. Bila alat produksi menguasai manusia, maka manusia akan kehilangan esensi kemanusiaannya. Ia akan menjadi bagian dari alat produksi tersebut sehingga menjadi kan kehidupan manusia seperti mesin sebagaimana "kehidupan" alat produksi.

Sampai akhirnya alat produksi tersebut menjauhkan manusia untuk mengenal fungsinya sebaegai manusia. Karenanya, menurut Marx, tidak ada tempat bagi kapitalisme di dalam kehidupan. Upaya revolusioner harus dilakukan untuk menghancurkan kapitalisme. Alat-alat produksi harus dikua sai oleh Negara guna melindungi rakyat. Kritik Mark atas kapitalisme ini diimplementasikan oleh Lenin dalam bentuk dominasi peran intitusi negara dalam perekonomian.

KESIMPULAN

Pembahasan pada makalah ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam dikembangkan berdasarkan asumsi bahwa persoalan ekonomi itu bersifat kompleks, sehingga membutuhkan pendekatan antar disiplin, khususnya antara displin ilmu-ilmu keagamaan dan ilmu pengetahuan umum multi-disiplin. Ilmu Ekonomi Islam adalah sebuah ilmu ekonomi kelembagaan (institutional economics).

Hasil pemikiran yang kompleks dan multi-dimensional dalam ekonomi Islam menimbulkan tiga kebutuhan. Pertama, kebutuhan *stream-lining* atau penggarisbawahan berbagai penemuan yang dinilai paling mendekati kebenaran. Kedua, kebutuhan restrukturisasi yang konsisten dan koheren. Dan ketiga membutuhkan integrasi untuk memben tuk kekuatan dan keuanggulan dalam aplikasinya.

Atas dasar asumsi di anas maka, pemikiran Ekonomi Islam pada dasarnya dapat digolongkan menjadi tiga. Pertama adalah pemikiran ekonomi yang berujud teori dan metodologi pemikiran atau epistemologi. Ketiga adalah sistem ekonomi sebagai media penerapannya melalui legislasi dan pelembagaan dalam pengelolaan sumber daya. Ketiga, realitas per ekonomian yang berjalan, baik berupa perekonomian umat Islam, bangsa Indonesia maupun dunia yang saling terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Sami' Al-Mishri, 2006, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Adiwarman A. Karim, 2012. *Ekonomi Mikro Islam,* (edisi ke-4). Jakarta: Rajawali Press.

Adiwarman Azhar Karim, 2004, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ali Yafie, 2003. *Fiqih Perdagangan Bebas*, Cetakan Kedua, Jakarta: Teraju dan PT. Ahad-Net Internasional.

Ashiddiqi, Hasbi dkk, 1971. *Al-Qur.an dan Terjemahnya*. Surabaya: Al-Hidayah.

Edwin. dkk., 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jomo K. S. 1993. *Islamic Economic Alternatives, Critical Perspectives and new Direction*. Kuala lumpur: Ikraq.

Koeter, G.H., Hiemstra, P.S. 1998. "Secretory Leukoprotease Inhibitor: A Native Antimicrobial Protein Presenting a New Therapeutic Option?" *Journal Thorax;* 53.

M. A. Mannan, 1970. *Islamic Economics: Theory and practice.* Lahore: SH Muhammad Ashraf.

M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, 2001. *Pengantar Ekonomi Islam,* Bogor: Al Azhar Press.

Muhammad Baqir Sadr, 2008. *Our Economic, dalam "Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishoduna"* (terj. Yudi). Jakarta: Zahra.